LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2025

JUDUL

"Integrasi Program 1 Keluarga 1 Sarjana dalam Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Tim Ahli

I Wayan Subamia, SE

Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mandiri, dan kompetitif. Di era transformasi sosial dan digital yang cepat, lulusan sarjana tidak hanya dipandang sebagai individu terdidik, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi menjadi agenda penting bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan program unggulan "1 Keluarga 1 Sarjana" (1K1S) sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Program ini bertujuan memastikan bahwa setidaknya satu anggota dari setiap keluarga, terutama keluarga miskin, memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana. Kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam memperluas keadilan sosial melalui sektor pendidikan.

Namun, keberhasilan program 1K1S di tingkat provinsi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kabupaten/kota mampu menerjemahkan dan mengintegrasikan program tersebut ke dalam kebijakan dan sistem tata kelola lokal yang kontekstual. Tanpa dukungan perencanaan teknis, kelembagaan pendamping, dan pendanaan berkelanjutan, program ini berisiko tidak menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, serta disparitas pembangunan antarwilayah, menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal akses pendidikan tinggi. Di wilayah seperti Nusa Penida, misalnya, hambatan transportasi,

ekonomi, dan informasi menjadi faktor penghalang utama bagi anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin di Klungkung yang tidak memiliki anggota keluarga dengan latar belakang pendidikan sarjana. Padahal banyak anak-anak dari keluarga ini memiliki prestasi akademik dan semangat belajar yang tinggi. Ini menjadi peluang yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif dan pendekatan kolaboratif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melihat peluang untuk merancang sebuah inovasi berbasis tata kelola daerah yang secara langsung mendukung realisasi program 1K1S. Inovasi tersebut akan menyatukan pendekatan pengumpulan data, seleksi berbasis merit, skema pembiayaan yang beragam, dan pendampingan secara berkelanjutan selama masa studi. Program "SARJANA DESA" hadir sebagai respon strategis terhadap tantangan dan kebutuhan tersebut. Tidak hanya sebagai program beasiswa, tetapi juga sebagai sistem penguatan kapasitas SDM berbasis keluarga dan desa. Konsep ini memadukan fungsi sosial, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat lokal secara integratif. Melalui pendekatan SARJANA DESA, diharapkan pemerintah desa dapat turut mengambil peran aktif dalam proses identifikasi calon penerima manfaat, memfasilitasi pendataan, serta mendorong budaya pendidikan tinggi di komunitasnya. Ini menjadi bentuk sinergi vertikal dan horizontal antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya bertujuan mengangkat satu individu dari keluarga miskin menjadi sarjana, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Sarjana-sarjana hasil program diharapkan menjadi lokomotif pembangunan di desa masing-masing, membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup keluarga serta lingkungannya secara berkelanjutan.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud: Merancang model inovasi daerah yang memperkuat dan menyelaraskan implementasi program 1 Keluarga 1 Sarjana di tingkat lokal melalui kebijakan, kelembagaan, dan sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menyediakan kerangka tata kelola daerah untuk pelaksanaan program 1K1S yang berbasis desa.
2. Memastikan sasaran program tepat pada keluarga miskin/kurang mampu yang berpotensi. 3.
3. Mengembangkan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dunia pendidikan, dan mitra swasta. 4.
4. Mendorong keterlibatan sarjana hasil program untuk kembali membangun desa asal.

II. Ide dan Gagasan

A. Konsep Pengentasan Kemiskinan melalui Jalur Pendidikan

SARJANA DESA didesain sebagai strategi pengentasan kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan tinggi. Pendidikan dipandang sebagai instrumen pembangunan manusia (human capital development), yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap mobilitas sosial vertikal. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga 17% per tahun dibandingkan lulusan SMA. Demikian pula, laporan UNESCO (2020) menekankan

bahwa pendidikan tinggi memperkuat ketahanan sosial ekonomi jangka panjang di negara berkembang.

Program ini mengambil pendekatan jangka panjang dengan menjadikan sarjana sebagai produk investasi sosial dalam keluarga miskin. Dalam konteks ini, program 1K1S bertindak sebagai bentuk "insentif struktural"—yakni mendorong keluarga miskin untuk mempertahankan pendidikan anaknya hingga jenjang sarjana dengan imbalan peluang keluar dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Conditional Cash Transfer (CCT) yang telah sukses di berbagai negara seperti Brasil (program Bolsa Família) dan Indonesia (Program Keluarga Harapan/PKH), di mana insentif finansial diberikan dengan syarat anak tetap bersekolah.

Melalui pendidikan tinggi, keluarga miskin tidak hanya memperoleh akses terhadap pekerjaan formal dan penghasilan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan status sosial dan literasi kolektif dalam komunitas. Dalam jangka panjang, lulusan program SARJANA DESA diharapkan menjadi pelopor perubahan di desanya: membuka usaha, menjadi penggerak sosial, serta membangun jejaring ekonomi lokal yang mengangkat keluarga dan komunitasnya dari jerat kemiskinan struktural. SARJANA DESA didesain sebagai strategi pengentasan kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan tinggi. Dengan memastikan bahwa setiap keluarga miskin memiliki setidaknya satu anggota yang menyelesaikan jenjang sarjana, program ini membuka akses terhadap mobilitas sosial vertikal. Pendidikan dijadikan sebagai instrumen insentif pembangunan, dengan mengarahkan generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk mengakses pekerjaan formal, membuka usaha, dan menjadi panutan di komunitasnya.

B. Konsep Penguatan Kapasitas SDM Keluarga dan Desa

SARJANA DESA tidak hanya bertujuan mencetak lulusan sarjana, tetapi juga dirancang sebagai motor penguatan kapasitas keluarga dan desa secara simultan. Konsep ini berakar pada pendekatan community-based human development, di mana pembangunan SDM tidak terfokus pada individu semata, tetapi juga mencakup pemberdayaan keluarga dan institusi sosial desa. Menurut UNDP (2021), penguatan kapasitas keluarga merupakan strategi efektif dalam memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Fungsi sosial program SARJANA DESA terlihat dari peningkatan literasi pendidikan dan aspirasi akademik dalam rumah tangga. Kehadiran satu anggota keluarga yang menempuh pendidikan tinggi dapat memicu motivasi belajar di antara adik/kakak kandung serta meningkatkan dukungan orang tua terhadap pendidikan. Fungsi pendidikan diwujudkan melalui skema pembinaan, pelatihan, dan mentoring selama masa studi, yang dirancang bersama komunitas lokal dan pemerintah desa.

Sementara itu, fungsi ekonomi lokal dicapai melalui kontribusi para sarjana setelah lulus, di mana mereka didorong untuk kembali ke desa dan berperan sebagai:

- fasilitator literasi digital,
- pendamping pengembangan UMKM lokal,
- kader pembangunan desa, tenaga literasi lingkungan dan sosial,
- mentor adik tingkat atau komunitas belajar desa.

Konsep ini memperkuat gagasan bahwa SDM unggul tidak hanya berorientasi keluar desa (urban migration), tetapi justru menjadi "aset balik" bagi pembangunan desa.

Pendekatan ini sejalan dengan program Village Return Program yang sukses diterapkan di Thailand dan Filipina, yang mendorong lulusan sarjana untuk berperan aktif dalam memodernisasi pembangunan desa. SARJANA DESA tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga dan desa sebagai ekosistem pembelajaran. Fungsi sosial program terlihat dari peningkatan literasi pendidikan dalam rumah tangga. Fungsi pendidikan diwujudkan dengan pendampingan dan pelatihan selama masa studi. Sementara itu, fungsi ekonomi lokal muncul melalui kontribusi para sarjana yang kembali ke desa sebagai inovator lokal, pelaku UMKM, pendamping digitalisasi, atau kader pembangunan desa.

C. Peran Aktif Pemerintah Desa

Pemerintah desa memegang peran kunci dalam keberhasilan implementasi program SARJANA DESA. Sebagai garda terdepan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi kebutuhan riil warganya. Dalam konteks ini, desa bukan hanya sebagai pelaksana administratif, melainkan juga sebagai motor penggerak budaya pendidikan tinggi di tingkat komunitas. Konsep ini sejalan dengan pendekatan local governance for education equity, yang mendorong desentralisasi peran pendidikan ke level komunitas (UNESCO, 2015).

Peran aktif desa mencakup fasilitasi verifikasi data keluarga miskin, penyusunan daftar prioritas calon penerima manfaat berdasarkan musyawarah desa, serta penyediaan rekomendasi dan dukungan sosial kepada siswa. Desa juga didorong untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa dalam bentuk BLT Pendidikan, bantuan logistik, atau dukungan kegiatan belajar informal seperti kelompok belajar komunitas.

Selain itu, desa dapat mengembangkan "Forum Pendidikan Desa" yang beranggotakan tokoh masyarakat, guru, alumni sarjana, dan kader pemuda yang bertugas menjadi mentor dan motivator di lingkungan lokal. Dengan membangun ekosistem edukatif ini, desa berperan menanamkan nilai bahwa pendidikan tinggi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk melindungi masa depan generasi muda. Program ini mengadopsi pembelajaran dari praktik baik seperti "Gerakan Kembali ke Sekolah" di India dan Program "Village Education Committees" di Bangladesh yang terbukti meningkatkan retensi pendidikan dan membangun partisipasi komunitas dalam pendidikan. Pemerintah desa diberikan mandat penting dalam pelaksanaan SARJANA DESA. Peran ini meliputi identifikasi awal keluarga sasaran, fasilitasi data dan dokumen pendukung, serta pembinaan budaya pendidikan tinggi di tingkat komunitas. Melalui musyawarah desa atau musdes pendidikan, desa dapat mendorong partisipasi aktif keluarga miskin dan membentuk ekosistem pendukung (peer group, mentor lokal, dan program motivasi).

D. Konsep Penerapan Program 1K1S

Penerapan program 1K1S dalam kerangka SARJANA DESA dilakukan dengan prinsip kolaboratif dan afirmatif, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan sektor pendidikan dan dunia usaha. Pendekatan ini mencerminkan praktik multistakeholder-based education program design yang telah diterapkan secara efektif di berbagai negara berkembang. Salah satu model rujukan adalah program Smart Start Scholarship Scheme di Kamboja yang berhasil menurunkan angka kemiskinan rumah tangga dengan cara mendanai

pendidikan tinggi anak-anak dari keluarga miskin.

Penerapan program dilakukan berbasis komunitas, dimulai dari musyawarah desa untuk menyepakati daftar keluarga prioritas yang memenuhi syarat. Kriteria afirmatif diberlakukan untuk keluarga yang belum pernah memiliki anggota bergelar sarjana, berada dalam kategori miskin menurut DTKS atau hasil verifikasi lokal, dan memiliki anggota keluarga dengan prestasi akademik yang layak.

Skema Pemilihan Penerima Program

Skema pemilihan disusun secara berlapis dan berbasis akuntabilitas sosial:

- **Tahap 1**: Identifikasi awal dilakukan oleh pemerintah desa melalui mekanisme Musdes Pendidikan dan menggunakan data dari DTKS, prestasi akademik, serta survei lokal.
- **Tahap 2**: Verifikasi administratif dan faktual dilakukan oleh OPD lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BRIDA, Bagian Kesra).
- **Tahap 3**: Seleksi akhir oleh Panel Independen yang terdiri dari akademisi, praktisi pendidikan, dan tokoh masyarakat.
- **Tahap 4**: Penandatanganan Kontrak Belajar dan Komitmen Pengabdian oleh peserta dan orang tua/wali.

Model seleksi ini mengadopsi prinsip dari Targeting Mechanism in Pro-Poor Education Programs yang direkomendasikan oleh OECD dan Asian Development Bank, untuk memastikan program menjangkau keluarga miskin secara tepat.

Skema Pendanaan

Pendanaan SARJANA DESA dirancang dengan pendekatan campuran (blended financing), menggabungkan sumber daya publik, swasta, dan masyarakat:

- APBD Kabupaten: untuk operasional, transportasi, dan bantuan studi utama.
- Dana Desa: dialokasikan melalui Musyawarah Desa untuk kegiatan pendidikan.
- CSR Dunia Usaha dan Lembaga Filantropi: berupa sponsorship biaya kuliah atau pendampingan karier.
- Beasiswa Perguruan Tinggi: pengurangan UKT, penyediaan asrama, dan insentif akademik. Model ini mengacu pada pengalaman keberhasilan skema Education Opportunity Fund di Korea Selatan dan Triple-Helix Scholarship Partnerships yang menghubungkan pemerintah, industri, dan universitas dalam mendanai pendidikan keluarga kurang mampu.

Skema Kerjasama dengan Perguruan Tinggi:

Pemerintah Kabupaten Klungkung membangun kemitraan strategis melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Kerja sama ini mencakup: Penyediaan kuota beasiswa untuk jalur afirmasi. Pendampingan akademik, psikologis, dan motivasional. Kegiatan magang, KKN tematik, dan program riset terapan di desa asal. Fasilitasi tugas akhir dan diseminasi hasil studi yang relevan dengan pembangunan desa. Kemitraan ini dirancang dengan merujuk pada pendekatan University-Community Engagement Framework seperti yang diterapkan di Malaysia dan Jepang, yang menekankan penguatan peran kampus dalam pembangunan komunitas lokal berbasis riset dan pengabdian masyarakat.

III. Rekomendasi

Beberapa rekomenasi yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui BRIDA meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten Klungkung disarankan menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program 1K1S Berbasis Desa sebagai payung hukum program inovatif ini.
2. BRIDA dan Bappeda dapat memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan SDM Kabupaten Klungkung yang mengintegrasikan pendekatan 1K1S sebagai strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang.
3. Membentuk Tim Seleksi dan Pendamping 1K1S Kabupaten, dengan keanggotaan dari unsur OPD teknis, tokoh akademik, desa, dan pemuda.
4. Mengembangkan Sistem Informasi 1K1S Klungkung yang mencakup data penerima manfaat, status studi, serta pengabdian pasca-lulus.
5. Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan dunia usaha melalui MoU untuk mendukung biaya dan mentoring program.

Semarapura, 26 Mei 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-